

PARTISIPASI POLITIK KELUARGA PRAJURIT TNI ANGKATAN LAUT PADA PEMILIHAN WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2020

Oleh:

Herlina Nur Aisjah¹, Mangihut Siregar²

¹ Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia

² Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia

Email: mamakucantik63@gmail.com, mangihut@uwks.ac.id

Corresponding Author

Abstrack

Political participation is an important part of democratic practice in a democratic country. It takes full involvement of community participation in making decisions, implementing decisions and being responsible for the decisions that have been agreed upon. This study aims to find out how the families of Navy soldiers understand the TNI neutrality rules in the 2020 Surabaya Mayor Election, analyze the form of political participation of the Navy soldiers' families in the 2020 Surabaya Mayoral Election, and analyze the implications of the neutrality of Navy soldiers on families in the implementation of the 2020 Surabaya Mayor election. The method used in this study is a qualitative method with interview, observation and document techniques. The results of the study indicate that the families of the Navy soldiers already know the rules of neutrality of the TNI in the General Election. In the exercising of their rights, the families of TNI members who become civilians only participate as voters, no one has participated as an election officer and no one has participated as a member of the success team. The Navy soldiers give freedom to family members to make their choices.

Key words : political participation, neutrality, TNI soldier family, democracy

Abstrak

Partisipasi politik merupakan bagian penting dari praktik demokrasi dalam sebuah negara demokrasi. Partisipasi masyarakat membutuhkan keterlibatan penuh dari para seluruh rakyat dalam mengambil keputusan, menjalankan keputusan dan bertanggung jawab pada keputusan yang telah disepakati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman keluarga prajurit TNI Angkatan Laut dalam aturan netralitas TNI dalam Pemilihan Walikota Surabaya 2020, menganalisa bentuk partisipasi politik keluarga prajurit TNI Angkatan Laut pada Pemilihan Walikota Surabaya 2020, dan menganalisa implikasi netralitas prajurit TNI Angkatan Laut pada keluarga dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota Surabaya 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik wawancara, observasi serta dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga prajurit TNI Angkatan Laut sudah mengetahui aturan netralitas TNI pada Pemilu. Dalam pelaksanaan haknya, keluarga anggota TNI yang masuk menjadi warga sipil hanya berpartisipasi sebagai

pemilih belum ada sebagai petugas pemilihan dan juga sebagai anggota tim sukses. Para prajurit TNI Angkatan Laut memberikan kebebasan kepada anggota keluarga untuk menentukan pilihannya.

Kata kunci: partisipasi politik, netralitas, keluarga prajurit TNI, demokrasi

A. Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan suatu mekanisme dari sistem politik yang ada di Indonesia. Seperti yang dikatakan Masdar (1999: 177) pemilihan umum dilakukan melalui pencoblosan tanda gambar untuk memilih wakil-wakilnya baik di tingkat daerah maupun pusat. Untuk mewujudkan pemilihan umum yang demokratis maka diperlukan partisipasi politik dari masyarakat. Menurut Sastroatmojo (1995: 67) bahwa partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah karena dipengaruhi adanya proses politik warga negara yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

Partisipasi masyarakat merupakan hal penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Tanpa partisipasi masyarakat sebagai pemilih maka sesungguhnya Pemilu tidak memiliki kedaulatan. Adapun ukuran partisipasi tersebut dapat dilihat dari adanya keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan tahapan Pemilu, baik sebagai pemilih, sebagai petugas maupun sebagai calon legislatif (Isbandi (2007: 27). Partisipasi politik merupakan keikutsertaan masyarakat mulai dari proses mengidentifikasi masalah, potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan serta solusi yang digunakan untuk menangani setiap masalah. Peran serta masyarakat yang aktif sangat dibutuhkan demi terciptanya kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum atau pemilihan daerah. Keluarga militer dari TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan purnawirawan merupakan warga masyarakat juga mempunyai hak pilih dan dipilih

dalam demokrasi di Indonesia. Mereka berhak memilih presiden/wakil presiden, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, DPD, DPR, dan DPRD.

Selain untuk memilih jabatan yang disebutkan di atas, keluarga prajurit dan juga purnawirawan berhak untuk dipilih dalam jabatan politik tersebut. Setiap masyarakat sipil tersebut memiliki pilihan dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan yang terbaik menurut hati nuraninya. Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat tersebut adalah tanggungjawab bersama antara penyelenggara, peserta pemerintahan dan organisasi sipil.

Keluarga prajurit TNI yang dimaksud dalam tulisan ini meliputi: isteri (suaminya TNI), suami (isterinya TNI), dan anak-anak dari prajurit yang sudah mempunyai hak pilih.

Keberadaan dari keluarga prajurit Tentara Nasional Indonesia tersebut merupakan hak perseorangan sebagai *good citizenship* yang harus terpenuhi dalam bersuara. Diharapkan, masyarakat sipil tersebut tidak berhenti berpartisipasi memberikan suara hanya pada pelaksanaan Pilkada saja, akan tetapi mereka juga akan ikut mengontrol jalannya pemerintahan setelah pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah berlangsung. Keluarga besar Tentara Nasional Indonesia harus bersikap mandiri dan mempunyai ketetapan pilihan yang sesuai dengan hati nurani mereka masing-masing (Nurissafa'a, 2019).

Satuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) ini dilarang untuk memberikan arahan

atau intervensi pada keluarganya dalam menentukan hak pilih mereka. Sesuai Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 pasal 2 menyebutkan bahwa “jati diri TNI adalah tentara profesional tidak berpolitik praktis, mengikuti kebijakan politik negara dan seterusnya. Pasal 39 juga menjelaskan bahwa “prajurit Tentara Nasional Indonesia dilarang terlibat dalam kegiatan anggota partai politik, kegiatan politik praktis, kegiatan bisnis, kegiatan untuk menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politisi lainnya”.

Tentara Nasional Indonesia harus bersikap netral dalam politik di Negara Indonesia, hal ini sesuai pelaksanaan reformasi TNI pada tahun 1999 yaitu tentang pelepasan Dwifungsi ABRI, dengan wujud implementasi melepaskan peran sosial politik TNI. Dengan demikian, Tentara Nasional Indonesia tidak lagi melibatkan diri dalam politik partisipan sebagai bagian dari golongan karya (Golkar), melikuidasi Fraksi TNI/Polri di MPR, DPR dan DPRD, serta menanggalkan doktrin kekaryaan dengan tidak lagi menempatkan prajurit aktif TNI dalam jabatan sipil (Widjoyo, 2015). Seluruh personil Tentara Nasional Indonesia (TNI) memberikan jaminan akan netral dalam mengikuti pemilihan umum yang berlangsung di negara ini.

Secara teoretis ada dua kelompok masyarakat yang harus netral yaitu kelompok militer yang harus melindungi masyarakat dan persatuan negara Indonesia dan kelompok Aparatur Sipil Negara (ASN) yang harus melayani seluruh masyarakat tanpa membedakan kepentingan politiknya. Adapun pengertian dari netral adalah tidak berpihak, tidak ikut, atau tidak membantu salah satu pihak.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah memberikan jaminan bahwa mereka akan selalu netral dalam Pemilu dan Pilkada yang berlangsung di negara ini. Hal ini

sesuai undang-undang nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam UU itu dengan jelas disebutkan bahwa TNI harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, serta dilarang terlibat dalam kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.

Untuk menjelaskan tentang netralitas TNI, maka dikeluarkanlah Instruksi Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor: Ins/1/II/2018 yang berisi pedoman netralitas TNI dalam Pemilu dan Pilkada yang terdiri dari tiga poin berikut ini:

1. Netralitas TNI adalah amanah dalam pelaksanaan reformasi internal TNI sesuai undang-undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Adapun pengertian netralitas TNI sebagai berikut: netral, “tidak berpihak, tidak ikut, atau tidak membantu salah satu pihak’ netralitas TNI: “TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis”.
2. Prajurit TNI yang hendak mengikuti pemilu dan pilkada harus membuat pernyataan mengundurkan diri dari dinas aktif (pensiun) sebelum tahap pelaksanaan pemilu dan pilkada (berdasarkan surat telegram panglima TNI Nomor STR/322/2016/ tanggal 26 September 2016).
3. Implementasi (pelaksanaan) netralitas pada TNI dalam Pemilu dan Pilkada, seperti:
 - a. Mengamankan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada sesuai dengan tugas dan fungsi bantuan TNI dan Polri.
 - b. Netral dengan tidak memihak dan memberikan dukungan pada salah satu konstantan Pemilu dan Pilkada.
 - c. Satuan/perorangan/fasilitas TNI tidak dilibatkan pada rangkaian

kegiatan Pemilu dan Pilkada dalam bentuk apa pun di luar tugas dan fungsi TNI.

- d. Prajurit TNI tidak menggunakan hak memilih baik dalam Pemilu atau Pilkada.
- e. Khusus bagi prajurit TNI (istri/suami/ anak prajurit TNI), hak memilih merupakan hak individu selaku warga negara, institusi atau satuan dilarang memberi arahan dalam menentukan pelaksanaan dari hak tersebut (Farchan, 2021). Partisipasi politik pada keluarga TNI Angkatan laut, seperti suami, istri dan anak-anaknya sangat dibutuhkan karena suara mereka sangat banyak dan dapat menentukan posisi seseorang dalam jabatannya. Sayangnya partisipasi penggunaan politik dari keluarga TNI Angkatan Laut sangat jarang terekspos, hal ini dikarenakan keterbatasan hak politik pada latar belakang suami yang merupakan prajurit aktif di lingkungan TNI. Para keluarga prajurit tersebut juga mempunyai hak politik yang sama dengan masyarakat sipil pada umumnya dalam mengikuti pemilihan umum. Keluarga besar TNI Angkatan Laut juga mempunyai dasar pemikiran yang sangat kritis terhadap hal di sekitarnya, baik itu menyangkut masalah sosial, masalah politik, masalah lingkungan maupun gaya hidup.

Meskipun demikian, tak bisa dipungkiri bahwa masih muncul kekhawatiran akan keterlibatan anggota TNI aktif kepada keluarganya dalam pelaksanaan politik di negara kita, baik itu secara langsung maupun tidak langsung yang dapat memengaruhi hak politik keluarganya. Dengan alasan itu maka dilakukan penelitian ini terkait dengan partisipasi politik keluarga prajurit TNI Angkatan

Laut dalam pemilihan Walikota Surabaya yang telah selesai dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 yang lalu.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan penelitian kualitatif dengan tipe *case study*. Penelitian dilakukan pada keluarga prajurit TNI Angkatan Laut pada Pemilihan Walikota (Studi Kasus Pemilihan Walikota Surabaya 2020). Data hasil penelitian dianalisis secara mendalam tentang partisipasi politik sehingga didapatkan hasil penelitian yang menggambarkan “apa adanya” tentang gejala, keadaan dan implikasi netralitas TNI Angkatan Laut terhadap pelaksanaan pemilihan Walikota Surabaya tahun 2020. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis fenomena dari keikutsertaan keluarga TNI AL dalam ranah politik, serta mencoba menjelaskan atau mengungkapkan makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran dari masing-masing individu anggota keluarga prajurit.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah para anggota keluarga prajurit TNI Angkatan Laut aktif baik itu suami, istri maupun anak-anak yang sudah mempunyai hak pilih.

3. Sumber Data Penelitian

Data diambil dengan cara *purposif sampling* yaitu peneliti mengambil data dengan cara menentukan informan penelitian berdasarkan informan kunci dan informan tambahan. Selanjutnya digunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

- a. Data primer dengan memperoleh data di lapangan secara langsung, melalui wawancara.
- b. Data sekunder dari berbagai informasi yang telah ada sebelumnya, dan

digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Data didapatkan melalui buku, publikasi pemerintah, catatan internal organisasi, laporan, jurnal, hingga berbagai situs yang berkaitan dengan informasi yang sedang dicari.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dan alat pengumpulan data dilakukan agar hasilnya dapat menjadi data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam hal ini, penulis mengobservasi kejadian-kejadian yang berhubungan dengan partisipasi politik keluarga prajurit TNI Angkatan Laut pada pemilihan Walikota (studi kasus pemilihan Walikota Surabaya 2020), terlibat langsung ke lokasi penelitian dan mewawancarai responden yang akan diteliti, serta mengumpulkan data-data atau dokumen yang dibutuhkan, menganalisis data dan membuat kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pemahaman Keluarga Prajurit TNI Angkatan Laut Terhadap Aturan Netralitas TNI dalam Pemilihan Walikota Surabaya 2020

Penyelenggaraan Pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004 yang dilakukan secara langsung telah mengilhami dilaksanakannya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) secara langsung di Indonesia. Hal ini didukung oleh semangat otonomi daerah yang digerakkan pada tahun 1998. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah merupakan alat bantu bagi masyarakat di Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam bidang politik. Memberikan hak suara untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam pemerintahan, juga sebagai bukti adanya upaya untuk mewujudkan negara yang demokratis.

Pelaksanaan Pilkada di Surabaya tahun 2020 yang mempunyai tujuan untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Surabaya telah selesai dilaksanakan pada tanggal, 9 Desember 2020 dalam situasi pandemi Covid-19. Pemilihan kepala daerah tersebut diikuti oleh dua (2) pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Surabaya, yaitu pasangan nomor urut satu (1) Eri Cahyadi-Armuji dan pasangan nomor urut dua (2) adalah Machfud Arifin-Mujjaman.

Berdasarkan hasil wawancara pada pelaksanaan pemilihan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Surabaya pada tahun 2020 didapatkan informasi data bahwa keluarga TNI Angkatan Laut mengetahui kapan pelaksanaan pemilihan, memahami siapa saja calon pemimpin Kota Surabaya tahun 2020 dan mengetahui tata cara pemilihan walikota dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berbeda dengan pemilihan sebelumnya karena pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia tersebut dilaksanakan pada saat pandemi Covid-19.

Untuk menjaga dan mencegah penularan Covid-19, maka diterapkan protokol kesehatan ketat, mulai dari sebelum masuk TPS hingga selesai pencoblosan. Keluarga TNI Angkatan Laut yang juga merupakan orang sipil, juga mengikuti aturan atau tata cara pemilihan walikota yang telah dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dimulai dari pendaftaran, pemberian undangan pada para pemilih, sampai pelaksanaan pemilihan yang telah ditentukan oleh KPU. Semua diikuti oleh keluarga prajurit TNI Angkatan Laut dengan tertib. Informasi tentang pelaksanaan pemilihan walikota dan aturan-aturan tersebut diperoleh responden melalui berbagai media seperti televisi, radio, media sosial, pamflet-pamflet dan penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat lingkungan setempat.

Terbitnya informasi melalui sosial media sebagai alat penyebaran informasi yang ditujukan kepada masyarakat ataupun pemilih dalam Pemilu dianggap sebagai langkah yang efektif dan penting, terlebih khusus dalam membentuk opini dan pengaturan agenda politik (Woolley, 2010).

Saat ini Kota Surabaya dipimpin oleh Walikota Eri Cahyadi dan Wakil Walikota Armudji yang merupakan murni pilihan dari masyarakat Surabaya. Sebagaimana teori yang disampaikan oleh Harris G Waren dkk (1998) yang menyatakan bahwa Pilkada adalah kesempatan rakyat memilih pemimpin mereka. Selain untuk memilih, pemilihan calon walikota juga memutuskan, apa yang ingin pemerintah lakukan untuk mereka. Keputusan rakyat ini juga menentukan hak yang mereka miliki dan ingin mereka jaga.

Berkaitan dengan pemahaman tentang pentingnya pemilihan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Surabaya tahun 2020, maka didapatkan data dari hasil wawancara dengan keluarga TNI Angkatan Laut bahwa pemilihan walikota tersebut sangat penting. Mereka yakin bahwa orang yang dipilih sebagai walikota di Surabaya akan mengemban amanah yang tinggi sebagai pemimpin dari kota kedua terbesar di Indonesia setelah Jakarta. Peranan yang sangat strategis tersebut menjadikan sosok walikota harus bisa menjembatani hubungan dari masyarakat pada pimpinan tertinggi, demikian pula sebaliknya. Diharapkan walikota yang baru lebih baik dalam kepemimpinannya agar Kota Surabaya bertambah bagus dan walikota bisa menyatu dengan warganya.

Berdasarkan hasil wawancara yang berkaitan dengan aturan netralitas TNI, maka didapatkan data bahwa semua keluarga TNI Angkatan Laut telah mengetahui adanya aturan netralitas TNI. Netral yang artinya bahwa aparat sipil negara dan militer

(tentara dan anggota polri) tidak diperbolehkan mengikuti semua kegiatan politik selama aktif berdinis dan tidak boleh ikut memilih dalam pemilihan umum ataupun Pemilukada. Seperti pernyataan dari saudara Ernawati: "...Saya mengetahui tentang aturan netralitas TNI yaitu tidak boleh memihak pada salah satu partai dan tidak boleh ikut berpolitik".

Melihat kembali Undang-undang nomor 34 tahun 2004 yang menyatakan bahwa TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan memiliki tugas yang harus diemban. Sesuai dengan undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (1), tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, TNI harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Hal ini mempertegas kembali tentang kenetralan TNI dalam dunia politik. Keluarga prajurit TNI Angkatan Laut tersebut juga telah diberikan pemahaman tentang netralitas TNI dari suami atau keluarganya yang militer. Pemahaman ini diperoleh anggota keluarga melalui dinas TNI, kegiatan seminar dan juga penyuluhan. Selain penyuluhan dari dinas TNI, anggota keluarga juga mendapatkan informasi dari media massa dan juga penyuluhan dari petugas KPU.

2. Partisipasi Politik Keluarga Prajurit TNI Angkatan Laut pada Pemilihan Walikota Surabaya 2020

Peran serta masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Bentuk peran serta dapat dengan cara memilih pimpinan negara, yang secara langsung atau tidak langsung

memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan untuk mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya (Budiardjo, 2009). Hak untuk berkumpul, berserikat, menyampaikan pendapat tentang politik, menduduki jabatan politik, dan memilih dalam pemilihan umum juga merupakan hak politik warga negara yang dijamin UUD 1945. Termasuk di antaranya hak untuk membentuk suatu organisasi politik dan berkecimpung di dalamnya atau terlibat secara aktif dalam aktivitas politik.

Kesediaan memberikan suara dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau Pilkada di Surabaya, merupakan salah satu penerapan sila ke empat (4) dari Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Masyarakat Kota Surabaya yang sudah mempunyai hak pilih diharapkan ikut berpartisipasi dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya tahun 2020. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah maka semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pemilukada tersebut.

Ada beberapa bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya tahun 2020 antara lain:

- Sebagai pemilih
- Sebagai petugas Pilkada baik di tingkat kecamatan, kelurahan sampai di tempat pemungutan suara yang tersebar di seluruh wilayah Surabaya.
- Sebagai tim sukses dari partai yang ikut dalam pemilihan kepala daerah dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan bentuk partisipasi pada pemilihan Walikota Surabaya tahun 2020, didapatkan data hasil wawancara dengan keluarga prajurit TNI Angkatan Laut bahwa bentuk partisipasi mereka sebagai warga sipil yang menggunakan hak politiknya yaitu dengan bersedia menghadiri dan mengikuti setiap proses pemilihan mulai dari saat pendataan pemilih, pendaftaran calon peserta Pilkada, dan saat pemilihannya. Ikut andil dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan dan kemajuan Kota Surabaya di masa mendatang. Seperti pernyataan dari saudara Ernawati: “...Saya bersedia hadir dan ikut memberikan suara pada pemilihan calon Walikota Surabaya, untuk memilih calon Wakil Walikota yang saya sukai”.

Kehadiran warga sipil seperti keluarga TNI Angkatan Laut pada saat pemilihan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Surabaya merupakan salah satu penerapan dari partisipasi masyarakat yang hadir dan memberikan suaranya agar dapat terwujud keinginan masyarakat terhadap pimpinan yang baik dan amanah sesuai visi dan misi yang disampaikan pada saat kampanye. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kumorotomo (1999), pakar Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada, yang mengatakan bahwa “partisipasi adalah bentuk corak tindakan massa atau individual yang memperlihatkan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dan warganya”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga prajurit TNI Angkatan Laut yang berkaitan dengan pemberian suara pada pelaksanaan pemilihan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Surabaya pada tahun 2020 didapatkan data bahwa mereka juga tidak ada yang mendorong atau menekan untuk memilih siapa pun calon yang disukainya. Keluarga tersebut diberikan kebebasan memilih atas inisiatif sendiri.

Sebagaimana Surbakti (1999) menyebutkan bahwa ada dua faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi politik seseorang yaitu:

- a. Aspek kesadaran politik pada pelaksanaan pemerintahan (sistem politik). Yang dimaksud kesadaran politik juga meliputi kesadaran hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Seperti hak politik, hak ekonomi, kewajiban sosial dan lain-lain.
- b. Dan adanya penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahannya.

Berkaitan dengan partisipasi dan keikutsertaan dalam pemilihan Walikota Surabaya tahun 2020, didapatkan data dari wawancara dengan keluarga prajurit TNI Angkatan Laut bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, mereka hanya berpartisipasi sebagai pemilih. Seperti pernyataan saudara Nurlaeli: "...Saya sebagai pemilih saja". Berdasarkan data yang diperoleh belum ada yang menjadi petugas pemilihan dan juga belum ada yang menjadi tim sukses dari salah satu partai politik.

Pemahaman para keluarga TNI Angkatan Laut tentang partisipasi mereka dalam pemilihan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Surabaya tahun 2020 sudah sesuai dengan kapasitasnya sebagai warga sipil yang mempunyai hak juga untuk memilih dan menyalurkan aspirasinya demi kebaikan dan kemajuan Kota Surabaya. Keikutsertaan masyarakat dalam Pilkada bertujuan untuk mendorong perubahan yang lebih baik adalah wujud dari partisipasi yang dilakukan oleh warga negara dari mulai tingkatan pasif hingga aktif. Keluarga TNI Angkatan Laut sebagai warga sipil juga mempunyai hak politik untuk memilih dan dipilih untuk menyalurkan aspirasinya demi kebaikan dan kemajuan Kota Surabaya.

3. Implikasi Netralitas Prajurit TNI Angkatan Laut dalam Keluarga pada Pelaksanaan Pemilihan Calon Walikota Surabaya 2020

Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi dari setiap individu. Kebebasan merupakan idaman setiap orang dalam kehidupannya. Salah satu hak asasi manusia sebagai makhluk hidup bebas dan merdeka adalah kebebasan mengeluarkan pendapat dan menyampaikan aspirasi.

Pada pelaksanaan pemilihan umum, baik itu pemilihan presiden ataupun pemilihan kepala daerah, banyak faktor yang memengaruhi pemilih menjatuhkan pilihannya kepada seseorang. Umumnya faktor yang memengaruhi adalah agar tercipta kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik dapat dari segi ekonomi, ketertiban, keamanan, politik, agama, sosial, dan lain-lain.

Faktor yang paling dominan yang memengaruhi keputusan dalam memberikan suara pada pelaksanaan pemilihan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Surabaya pada tahun 2020 berdasarkan visi dan misi yang disampaikan para calon. Pengetahuan visi dan misi para calon diketahui para pemilih melalui kampanye secara langsung dan juga melalui mulut ke mulut masyarakat. Para TNI Angkatan Laut memberikan kebebasan kepada anggota keluarganya untuk memilih calon walikota dan calon wakil walikota sesuai dengan hati nurani masing-masing. Hal ini terlihat dari pernyataan Ernawati: "...Suami saya tahu kalo saya ikut pemilihan calon Walikota Surabaya".

Proses memilih calon Walikota dan calon Wakil Walikota Surabaya tahun 2020 dilaksanakan secara langsung dan terbuka sehingga semua masyarakat mengetahui proses pelaksanaannya. Implikasi netralitas TNI dalam hal ini

dapat terlihat pada waktu pemilihan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Surabaya. Para anggota keluarga diberikan kebebasan untuk memilih dan menentukan pilihannya sendiri pada salah satu calon walikota tanpa adanya campur tangan dari anggota TNI aktif dan juga larangan atau paksaan. Untuk tetap menjaga netralitas TNI tersebut maka dibuatkan kebijakan khusus oleh dinas TNI Angkatan Laut tentang pelaksanaan pemilihan Walikota Surabaya antara lain yaitu:

- Tidak ada pamflet-pamflet atau brosur dari partai yang masuk ataupun tertempel wilayah kompleks TNI, wilayah tersebut harus bersih dari segala atribut partai.
- Untuk lokasi pemungutan suara yang digunakan untuk memilih juga harus netral yaitu berada di lingkungan sipil.
- Demikian juga para petugas Pilkada semua dari orang-orang sipil yang berada di sekitar komplek TNI Angkatan Laut Kenjeran Surabaya.

Gabriel Almond yang dikutip SP Varma dalam *Modern Political Theory* (1976) mengemukakan tentang sistem politik sebagai berikut:

“Political system typically perform the functions of maintaining the integration of society, adapting and changing the elements of the kinship, religious, and economics system, protecting the integrity of political system from outside teats, or expanding into and attacking in the other sosieties”. Pandangan Almond yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan fungsi-fungsi mempertahankan kesatuan masyarakat, menyesuaikan dan mengubah unsur pertautan hubungan, agama, dan sistem ekonomi, melindungi kesatuan sistem politik, serta ancaman-ancaman dari luar atau mengembangkannya terhadap masyarakat lain atau menyerangnya adalah merupakan sistem politik yang sesungguhnya.

Hal tersebut sesuai dengan tugas pokok TNI yaitu sebagai alat untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Tugas yang lain yaitu, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Penegasan ini termuat dalam undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (1). Oleh sebab itu TNI harus netral dalam dunia politik.

Kehidupan keluarga besar TNI Angkatan Laut dapat terjalin dengan baik dan juga kebersamaan yang erat antar sesama anggota keluarganya. Apabila terjadi hal yang menimbulkan keresahan akan selalu dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh keluarga. Tradisi melakukan musyawarah sehingga didapatkan penyelesaian masalah dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku.

Pelaksanaan pemilihan Walikota Surabaya pada tahun 2020, terdapat saling tukar pendapat dan komunikasi di antara sesama anggota keluarga TNI tentang siapa calon walikota yang akan memimpin kota Surabaya. Mereka saling bertukar pikiran tentang bagaimana figur walikota, apa saja visi dan misi serta latar belakang calon walikota yang akan datang, semua tak bisa dipungkiri akan menjadi bahasan yang menarik dalam komunikasi rumah tangga. Saran dan pendapat yang ada akan dapat memengaruhi seseorang dalam menentukan pilihannya, terutama pada keluarga TNI Angkatan Laut yang merupakan warga sipil dan mempunyai hak untuk memilih. Ada kekhawatiran akan adanya muatan-muatan politis pada keluarganya guna memenangkan suara pada salah satu calon walikota.

Hasil wawancara dengan keluarga TNI Angkatan Laut didapatkan data bahwa apabila ada saran-saran atau masukan dari suami, istri, orang lain tentang calon

Walikota Surabaya tersebut, maka keluarga prajurit tetap pada pilihannya sendiri sesuai hati nuraninya. Seperti pernyataan saudara Ernawati: "...Tidak, saya tetap pada pendirian".

Keluarga prajurit TNI Angkatan Laut, diberikan kebebasan memilih tanpa campur tangan anggota TNI aktif. Walaupun masing-masing anggota keluarga mempunyai kebebasan, namun mereka juga mempertimbangkan saran-saran dari anggota keluarga lainnya. Saran yang mereka dapatkan hanya sebagai pertimbangan saja untuk memilih salah satu calon Walikota Surabaya tahun 2020. Keputusan dalam memilih Walikota tetap pada masing-masing individu. Dapat disimpulkan bahwa hak mutlak memilih dan memutuskan ada pada para pemilih sendiri yang terdiri dari keluarga militer tersebut.

Meminjam pendapat Nursal yang mengutip pendapat Kotler (1995) juga Peter dan Olson (1993), bahwa ada beberapa respon pemilih terhadap pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Tahapan tersebut antara lain:

- a. *Awareness*, yang dimaksud adalah apabila seorang pemilih memiliki kesadaran yang tinggi untuk dapat mengingat nama-nama peserta kontestan Pemilu. Akan tetapi seorang pemilih tentu tidak dapat mengingat semua nama peserta Pemilu, untuk itu hanya kontestan-kontestan yang mempunyai *awareness* tinggi yang akan dipilih.
- b. *Knowledge*, yang dimaksud adalah seorang pemilih berada dalam tahap mengetahui informasi penting saja dari seorang kontestan sehingga pemilih akan mempunyai pola pikir yang bermakna politis pada kontestan tersebut.
- c. *Liking*, yang dimaksud adalah terbentuknya rasa suka pada seorang

pemilih terhadap seorang kontestan, sehingga pada pikiran pemilih timbul harapan pada kontestan untuk menyampaikan aspirasinya.

- d. *Preference*, yaitu seorang pemilih masuk pada tahapan yang menganggap bahwa salah satu kontestan lebih menjanjikan dari kontestan yang lain.
- e. *Conviction*, yaitu seorang pemilih telah sampai pada tahapan terhadap keyakinan untuk menentukan salah satu pilihan pada kontestan tertentu.

Sebagai warga Surabaya yang baik, maka keluarga prajurit TNI Angkatan Laut juga mempunyai hak untuk memilih sendiri calon walikotanya. Pilihan itu sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Mereka memilih dengan harapan bahwa pemimpin yang baru dapat menjadikan Kota Surabaya menjadi lebih baik lagi ke depannya.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang partisipasi politik keluarga prajurit TNI Angkatan Laut pada pemilihan walikota (studi kasus pemilihan Walikota Surabaya 2020), sebagai berikut:

1. Keluarga prajurit TNI Angkatan Laut yang merupakan warga sipil mengetahui kapan waktu pelaksanaan pemilihan. Mereka juga mengetahui siapa saja calon Walikota dan calon Wakil Walikota Surabaya. Umumnya mereka sudah memahami bagaimana tata cara atau aturan yang ada dalam pelaksanaan pemilihan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesesuai dengan masa pandemi Covid-19 pada saat itu. Sosialisasi tentang aturan dan tata cara pemilihan Walikota Surabaya dapat dilihat dan dipelajari melalui cara

daring atau *online*, sebaran brosur, pengumuman, pamflet, ataupun langsung dengan cara tatap muka pada masyarakat. Apabila tidak mengerti dan tidak paham, maka para petugas di tempat pemungutan suara akan membantu dalam pelaksanaan pemilihan tersebut. Keluarga besar TNI Angkatan Laut juga telah memahami netralitas TNI yang tidak boleh mengikuti kegiatan politik baik aktif maupun pasif. Dan bila ada anggota TNI yang mengikuti kegiatan politik maka harus mengundurkan diri dari dinas terlebih dahulu.

2. Pemilihan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Surabaya pada tahun 2020 yang telah dilaksanakan dengan baik, dapat disimpulkan bahwa para keluarga anggota TNI Angkatan Laut juga ikut berpartisipasi dengan menyalurkan aspirasinya dalam melaksanakan kegiatan demokrasi, yaitu bersedia menghadiri dan mengikuti setiap proses pemilihan tersebut. Pada saat pemilihan Walikota Surabaya, keluarga prajurit TNI Angkatan Laut menggunakan hak politik mereka dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan dan kemajuan Kota Surabaya. Sedangkan bentuk partisipasi politik keluarga prajurit TNI Angkatan Laut hanya sebagai pemilih, belum ada yang menjadi petugas pemilihan ataupun sebagai tim sukses dari sebuah partai (pasangan calon).
3. Prajurit TNI sudah mengetahui bahwa mereka harus bersikap netral dalam kehidupan politik praktis. Oleh karena itu dalam implikasi netralitas TNI tersebut, para prajurit memberikan kebebasan dalam melaksanakan pemilihan tersebut tanpa memengaruhi atau memaksakan kehendaknya. Keluarga TNI tersebut tidak mendapatkan tekanan (bebas) dalam menentukan pemilihan pada

saat pelaksanaan Pemilu atau Pemilukada. Saran-saran yang diberikan oleh suami, istri, atau orang lain tentang calon-calon tersebut, hanya sebatas masukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hak mutlak memilih dan memutuskan adalah para pemilih sendiri yang terdiri dari keluarga militer tersebut. Bentuk netralitas TNI Angkatan Laut terlihat melalui adanya larangan menempelkan brosur, pamflet maupun gambar partai dari kandidat calon walikota di lingkungan kompleks perumahan Angkatan Laut. Dan tempat atau lokasi pemilihan kepala daerah berada di luar kompleks Angkatan Laut, demikian juga petugas-petugasnya berasal dari warga sipil yang berada di lingkungan sekitarnya.

E. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan:

1. Adanya pendidikan politik yang cukup pada anggota keluarga prajurit TNI Angkatan Laut, juga merupakan warga sipil yang mempunyai hak memilih dan dipilih.
2. Diberikan kesempatan bagi keluarga prajurit TNI Angkatan Laut yang merupakan warga sipil untuk ikut menjadi petugas pada setiap pelaksanaan pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah sehingga dapat memperoleh pengetahuan tentang proses Pemilu.

Daftar Pustaka

- Adi, Isbandi Rukmianto, 2007. *Perencanaan Partisipasi Berbasis Aset Komoditis, dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Almond, Gabriel A. 1960. *The Politics of the Developing Areas*. Princeton:

- Princeton University Press.
- Budiarjo, Miriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Deni, Yanuar. 2009. *Militer pada pemilu legislative: Antara Netralitas dan Profesionalitas*. AL-IJTIMA'I- International Journal of Government and Sosial Science.
- Farchan. Yusa'. *Netralitas TNI pada Pemilu 2019 dalam Perspektif Hubungan Sipil dan Militer*. Jurnal Adhikari Volume 1 Nomor 01, Juli 2021 hal 42-51
- Harris G. Warren dan Harianto. 1998. *Partai Politik Untuk Tujuan Umum*. Yogyakarta: Liberty.
- Kotler, Philip. 1993. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta.
- Masdar, Umaruddin dkk. 1999. *Mengasah Naluri Publik Memahami Nalar Politik*. Yogyakarta: LKIS dan The Asia Foundation.
- Newton, Kenneth dan Jan W. Van Deth. 2016. *Perbandingan Sistem Politik Teori dan Fakta*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Nurissafa'ah, Beiti dan Maya Mustika Kartika Sari. 2019. *Pandangan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut di Komando Armada II Surabaya tentang Netralitas Politik TNI*. Kajian Moral dan Kewarganegaraan. Volume 07 Nomor 02 Tahun 2019, 828-842.
- Nursal, Adman. 2004. *Political Marketing, Strategi Memenangkan Pemilu Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden*. Jakarta: Gramedia.
- Putra, Gemawan Dwi. 2020. *Pemilu 2019 Lancar dan Sukses: Netralitas TNI Harga Mati!* Indonesiabaik.id/infografi> pemilu2019-Lancar&sukses:Netralitas-TNI-harga-mati
- Saryono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sastoatmodjo, Sudijono. 1995. *Partisipasi Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press
- Siregar, Sarah Nuraini. 2019. *Netralitas Polri Menjelang Pemilu Serentak 2019*. Jurnal penelitian Politik volume 16 No. 1 Juni 2019 hal 35-46
- Surbakti, Ramlan. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- Widiasarana, Syahrul, Fathullah dan Mustajib Harianto. 2020. *Aturan Sipil dan Militer di Indonesia*. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social).
- Trisliatanto, Dimas Agung. 2020. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Wahyudi Kumorotomo. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Widjojo, Agus. 2015. *Transformasi TNI: Dari Perjuangan Kemerdekaan Menuju Tentara Profesional dalam Demokrasi*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Wijayanto, Jay. 2021. *KPU Tetapkan Eri- Armuji Pemenang Pilkada Surabaya 2020*. Diakses 20 Februari 2021. radarsurabaya.jawapos.com/read/2021/02/20/242601/kpu_tetapkan_eri_armuji_pemenang_pilkada_surabaya_2020.
- Wolley, J.K., Limperos, A.m., dan Oliver, M.B. *The 2008 Presidential Election, 2.0: A Content Analysis of User- Generated Political Facebook Groups*. Mass Communication and Society. Vol. 13 (5).